

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)

Vol. 5, No. 1, Mei 2023, pp. 145-163

Received 15 May 2022  Revised 20 August 2022  Accepted 22 August 2022

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT DI KABUPATEN GOWA**

**Latifa Nour Azizah1, Juanda Nawawi2, Andi Muhammad Rusli3**

1Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia

2Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia

3Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Corresponding Author:* [*latifanourazizah@gmail.com*](mailto:latifanourazizah@gmail.com)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Keyword:***  *Policy Implementation;*  *One Village One Product Program.*  **Kata Kunci:**  Implementasi Kebijakan;  Program One Village One Product. | ***Abstract:*** *The One Village One Product (OVOP) program is an innovative program to identify local products that can be developed and then assisted in market expansion. The OVOP program uses a regional potential development approach to produce a global-class local wisdom product but still has regional characteristics by utilizing local resources. This article aims to analyze the implementation of the OVOP Program from the aspects of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure carried out by the Industry and Trade Office of Gowa Regency. This writing uses a descriptive method. Data collection techniques using interviews, observation and documentation then the data obtained will be analyzed using qualitative techniques. The results showed that the implementation of the One Village, One Product Program in Gowa Regency has not been carried out effectively due to the absence of Regional Regulations (Perda) made, resulting in unclear procedures in its implementation.*  **Abstrak:** Program One Village One Product (OVOP) merupakan program inovatif guna mengidentifikasi suatu produk lokal yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar. Program OVOP menggunakan pendekatan pengemba ngan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal berkelas global namun tetap memiliki ciri khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Program OVOP dilihat dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa. Penulisan ini menggunakan metode deksriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program One Village, One Product di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan efektif dikarenakan tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat, sehingga terjadi ketidakjelasan prosedur dalam pelaksanaannya. |

# **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah wujud dari kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang salah satu tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disisi lain dengan adanya otonomi daerah diharapkan tercipta peningkatan daya saing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah juga menjadi pintu gerbang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan daerah dengan berdasar pada nilai dan potensi daerahnya masing-masing. Dengan begitu pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan suatu kebijakan maupun program pembangunan di wilayahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerahnya.

Salah satu program yang bersifat inovatif dewasa ini adalah program one village, one product. Program ini merupakan suatu program bersifat strategis guna mengidentifikasi suatu produk local yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar produk tersebut. Program one village, one product ini menggunakan pendekatan pengembangan potensi daerah disatu wilayah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal, berkelas global namun tetap memilki ciri khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Penggunaan kata satu desa sifatnya tidaklah mengikat, satu desa ini dapat kemudian diperluas skalanya menjadi kecamatan, kabupaten atau kota, walaupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis dimasing-masing daerah.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonom diwilayah Indonesia turut serta menjalankan program One Village, One Product. Program ini merupakan sebuah bentuk revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten gowa, dimana didalam pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat untuk turut serta mengembangkan sebuah produk yang kemudian dimasa yang akan datang produk tersebut akan menjadi produk khas dan kebanggaan wilayah local serta Program one village one product pada dasarnya merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Gowa guna meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan sekaligus sebagai salah satu upaya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kabupaten gowa. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan Program One Village, One Product yaitu : pertama, untuk menjalankan program tersebut dibutuhkan peraturan pemerintah yang jelas sebagai pedoman dalam menjalankan program tersebut agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan prosedur saat program tersebut diimplementasikan. Kedua, untuk mengembangkan suatu produk lokal dibutuhkan dukungan dari pelaku industri dan Kerjasama yang baik antar pemerintah, pelaku industri dan masyarakat untuk mencapai tujuan dari program OVOP. Ketiga, produk yang akan dikembangkan ini harus memiliki nilai kompetitif baik dipasal lokal hingga nasional atau bahkan menembus pasar global.

Dasar hukum penerapan Program One Village One Product (OVOP) adalah Keputusan Menteri Perindustrian, Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007, tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra. Regulasi ini sinergi dengan Visi Bupati Gowa dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian pula dengan Misi Bupati Gowa meningkatkan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal serta optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri Gowa. Namun dalam perkembangannya program one village one product sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa terkhusus kepada 14 Sentra IKM yang menjadi mitra binaan dari dinas perindustrian dan perdagaangan. Upaya untuk menjalankan dan mengembangkan program One Village, One Product dikabupaten Gowa harusnya dibarengi dengan mengeluarkan kebijakan tersendiri yang menyangkut dengan program tersebut. Belum adanya kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa menyebabkan adanya Ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program one village one product. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Gowa masih berpedoman pada aturan pemerintah pusat yakni, peraturan menteri perindustrian No, 78 Tahun 2007 Tentang Peningkatan Efektifitas pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan satu desa satu produk. Dengan tidak adanya peraturan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Gowa maka satu-satunya kebijakan yang menjadi pedoman adalah peraturan dari tingkat pusat yang secara substansial kebijakan tersebut bersifat umum dan tidak mendetail berdasarkan ciri khas dan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di daerah pelaksana program OVOP dalam hal ini Kabupaten Gowa. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Gowa melaksanakan program OVOP tanpa adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatannya adalah studi kasus yakni implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program one village, one product di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang digunakan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dengan menggunakan Teknik kualitatif. Penentuan informan kunci menggunakan Teknik purposive sampling yakni Teknik pengambilan sampel subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu dengan asumsi informan memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pelaku industri bata merah, pelaku industri sirup markisa, pelaku industri kerajianan tenun. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana analisis didasarkan pada data yang diperoleh. Berdasarkan teori George Edward III analisis implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**HASIL DAN DISKUSI**

**Implementasi kebijakan Program *one village one product* Di Kabupaten Gowa**

Dalam pembahasan tentang implementasi kebijakan Program *One vllage one product* yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Gowa akan menggunakan model yang di gagas oleh George Edward yang mana menggunakan 4 Komponen utama dalam menilai berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Adapun keempat komponen tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya , Disposisi serta Struktur Birokrasi..

**KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI**

Komunikasi, menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuatan keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjalankan program one village, one product mengusung pendekatan dengan mengadakan pameran produk-produk local setempat yang diikuti berbagai pelaku industry kecil dan menengah. Namun dalam pelaksanaan pameran produk tersebut tidak penjelasan mengenai program one village, one product yang mengakibatkan para pelaku industry hanya menganggap bahwa acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa sebatas pameran produk saja. Tidak adanya sosialisasi kepada para pelaku industry menegnai program one village, one product mengakibatkan ketidakjelasan dari program tersebut.

Pelaksanaan program *one village one product* di Kabupaten Gowa sejatinya merupakan manifestasi dari visi dan misi yang di rancang oleh pemerintah Kabupaten Gowa di bawah kepemimpinan pada periode pertama Bapak Adnan Puchrita Ichsan yang secara garis besar mencanangkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan perekonomian berbasis pada potensi keunggulan. Dengan adanya visi tersebut kemudian pemerintah Kabupaten Gowa melirik program *One Village One Product*  sebagai salah satu opsi yang tepat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis pada potensi keunggulan. Pengembangan industri lokal masyarakat mejadi satu kunci utama dalam merangsang kemandirian masyarakat, sebagaimana dalam konsep pemerintahan bahwa terciptanya kemandirian masyarakat menjadi poin penting dalam meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Berbicara tentang suatu program kebijakan pemerintah sejatinya perlu aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya aturan yang jelas tentu para implementor terkhusus pelaksana di lapangan akan kesulitan untuk melaksanakan program serta kesulitan untuk menyelaraskan program antar masing-masing sektor. Hal ini lah yang terjadi dalam pelaksanaan program *one village one product,*  payung hukum yang menjadi dasar ataupun pedoman adalah aturan langsung dari kementerian perindustrian. Pemerintah Kabupaten Gowa tidak memiliki payung hukum sendiri dalam pelaksanaan Program *One Village One Product* di wilayahnya, hal ini tentu menjadi salah satu poin pertanyaan karena pada dasarnya sebuah program kebijakan pemerintah wajib memiliki payung hukum. Aturan hukum dalam hal ini peraturan daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan program karena didalamnya terdapat penjabaran yang lebih rinci mengenai dasar, tahapan , metode dan standar pengukuran suatu program.

Pelaksanaan program one village one product selama ini berpedoman pada aturan pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Perindustrian No.78 tahun 2007 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan satu desa satu produk, didalam peraturan menteri tersebut tentu mengatur tentang tata cara pelaksanaan program *One Village One Product,* namun berpedoman dengan aturan pusat tidak sepenuhnya salah akan tetapi, perlu di pahami bahwa di dalam peraturan pemerintah pusat disusun atau dikonsep berdasarkan aturan umum dari pemahaman situasi dan kondisi yang umum pula. Sedangkan Situasi dan kondisi di masing-masing daerah tentu berbeda baik dalam hal sosial, ekonomi, politik di daerah. Disinilah arti penting dari adanya peraturan daerah dimana materi muatan perda berisi tentang seluruh materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang mampu menampung atau mengakomodir kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan. (Peraturan Menteri Perindustrian No.78 tahun 2007)

**SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya diperlukan sumber daya yang mendukung upaya implementasi program One Village, One product tersebut. Sumber Daya Manusia adalah salah satu factor terpenting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun industry/ perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dari sebuah program yang dicanangkan oleh institusi maupun perusahaan/ industri. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi merupakan penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. seperti dalam hal tenaga ahli yang terlibat aktif dalam proses kebijakan, tersedianya fasilitas-fasilitas untuk menunjang kebijakan yang telah ditetapkan serta sistem kesatuan yang memberikan sumber daya kewenangan secara jelas. Sumber daya, menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran

Sumber daya manusia didalam proses implementasi suatu program kebijakan pemerintah tentu memiliki peranan yang sangat penting, tanpa adanya manusia sebagai penggerak program kebijakan tidak akan terlaksana dan akan berimplikasi pada proses pencapaian tujuan dari program tersebut. Peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan program one village one product juga menjadi vital dalam proses pencapaian tujuan program tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki 21 orang pegawai tetap yang mana dari 21 orang tersebut secara khusus program one village one product di bawahi oleh bidang perindustrian berkoordinasi dengan bidang promosi dan pengembangan ekspor.

Pelaksanaan program one village one product yang di bawahi oleh dinas perdagangan dan perindustrian sejauh ini memiliki kendala terkait sumber daya manusia yang masih terbatas, hal ini terjadi karena segala tanggung jawab pelaksanaan program sepenuhnya diberikan kepada dinas perdagangan dan perindustrian tanpa adanya campur tangan langsung dari dinas terkait dalam hal ini dinas koperasi dan umkm dan dinas tenaga kerja yang mana berdasarkan tugas pokok dan fungsi seharusnya mampu menjadi partner kerja dari dinas perdagangan dan perindustrian.

Program one village one product dilaksanakan secara penuh oleh dinas perindustrian dan perdagangan hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi yang terjalin antar dinas terkait berdasarkan kerterikatan fungsi dan program kerja. Adapun dinas yang memiliki kedekatan serta integrasi tugas pokok dan fungsi dengan dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas koperasi dan UMKM serta dinas tenga kerja dan transmigrasi. Dinas koperasi mampu menjadi mitra bagi dinas perindustrian dalam program one village one product dengan menjamin kelangsungan usaha masyarakat melalui program pengawasan dan pembiayaan usaha masyarakat, dimana telah diketahui bersama bahwa pembiayaan usaha masyarakat menjadi salah satu kunci dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha masyarakat kecil menengah begitu pula bagi indsutri kecil masyarakat. Selaras dengan hal tersebut dinas tenaga kerja dapat pula menjadi mitra dalam program ini dalam kaitan pemberian pelatihan dan pengembangan bagi pemilik maupun para tenaga kerja didalam sebuah industri kecil masyarakat. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu program kebijakan pemerintah tentu tidak hanya dapat dilakukan dalam lingkup internal namun juga dapat dilakukan dalam lingkup eksternal dalam hal ini kepada pihak swasta. Namun pelibatan sektor swasta dalam menunjang pelaksanaan program *one village one product* juga belum dapat terlaksana. Hal ini menjadi penegasan kemudian bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa sumber daya yang ada sangat terbatas dalam pelaksanaan program tersebut. Industri masyarakat yang tergabung dalam program *one village one product* di wilayah kabupaten Gowa secara spesifik di golongkan kepada 3 kategori yakni kategori industri pangan, industri kimia dan kerajian serta industri mesin, logam dan, elektronika. Setiap kelompok industri tersebut di koordinir oleh masing-masing kepala seksi pada bidang perindustrian. Peran masing-masing kepala seksi di bidang perindustrian memiliki peranan penting dalam pengembangan industri masyarakat yang tergabung dalam program *one village one product* . Setiap kepala seksi membawahi dan menjadi koordinator langsung bagi setiap kelompok industri. Segala bentuk informasi terkait perkembangan program maupun proses pelatihan mitra industri akan dilaksanakan melalui perantara kepala seksi masing-masing. Tentunya proses pendampingan mitra industri dengan hanya mengandalkan masing-masing kepala seksi akan sangat menyulitkan mengingat mengingat setiap seksi industri mengkoordinir lebih dari satu mitra industri, terkhusus seksi pangan yang membawahi 20 mitra industri. Akan tetapi, perkembangan teknologi nampaknya menjadi salah satu kunci guna mempermudah koordinasi yang terjalin oleh setiap kepala seksi dengan masing-masing mitra industri.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsistennya implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Program One Village, One Product yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa belum dapat dilaksankan dengan optimal karena terkendala dengan kenyataan dilapangan bahwa untuk menjalankan suatu program yang berpedoman hanya pada kebijakan ditingkat pusat tanpa adanya pedoman tersendiri (Perda) yang berimplikasi pada ketidaktahuan akan kebutuhan yang diperlukan pada pelaksana dilapangan yang secara substansial kebijakan tersebut bersifat umum dan tidak mendetail berdasarkan ciri khas dan keadaan lingkungan social, ekonomi, dan politik di Kabupaten Gowa itu sendiri. Karena hal tersebut program one village, one product susah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan atau bahkan bantuan dalam bentuk pendanaan. Kekurangan informasi/ pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung. Belum adanya kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa mengenai Program One Village, One Product menyebabkan adanya ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program tersebut sehingga menghambat jalannya program tersebut.

**DISPOSISI DALAM IMPLEMENTASI**

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam pedoman program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusia dalam melaksankana tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Disposisi pemerintahan yang kuat dan positif mencerminkan komitmen dan orientasi yang mendukung pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Disposisi ini penting dalam membentuk budaya organisasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik dan efektif.

Sikap pelaksana terhadap suatu kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pengetahuan dan pemahaman dari seluruh instrument kebijakan sangat diperlukan karena dengan memahami tanggungjawabnya maka sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam menjalankan program One Village, One Product pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang memahami dan mengetahui program tersebut, sehingga sulit untuk melakukan alokasi sumber daya yang memadai. Pemerintah daerah tidak memahami sepenuhnya konsep dan tujuan dari program OVOP, sehingga kurang memberikan dukungan atau perhatian yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemahaman dan pengetahuan yang kurang dari pemerintah daerah berdampak pada kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku industry local maupun masyarakat tentang program OVOP.

**STRUKTUR BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI**

Menurut Edward , dua hal yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan organisasi ke arah yang lebih baik yakni SOP (Standap Operasional Pelayanan) dan Fragmentasi. SOP (Standap Operasional Pelayanan), keberadaan SOP diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam menerapkan peraturan.

Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Terkait SOP (Standar Operasional Pelayanan) dalam implementasi program one village, one product di Kabupaten Gowa yang mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian, Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007, tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra. Regulasi ini sinergi dengan Visi Bupati Gowa dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian pula dengan Misi Bupati Gowa meningkatkan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal serta optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri Gowa.

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan yang terbagi dua walayah 9 Kecamatan dataran rendah dan 9 Kecamatan dataran tinggi. Hal ini juga membedakan ketersediaan sumber daya lokal pada tiap Kecamatannya. Adapun implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah pembentukan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai upaya pemerintah dalam mengelompokkan IKM yang menghasilkan produk sejenis atau melakukan proses pekerjaan yang sama. Dari sinilah bentuk pendekatan pengembangan pengelolaan potensi daerah pada suatu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan terbentuknya Sentra Industri Kecil Menengah ini yang kemudian menjadi terapan pengusulan program OVOP pada tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa.

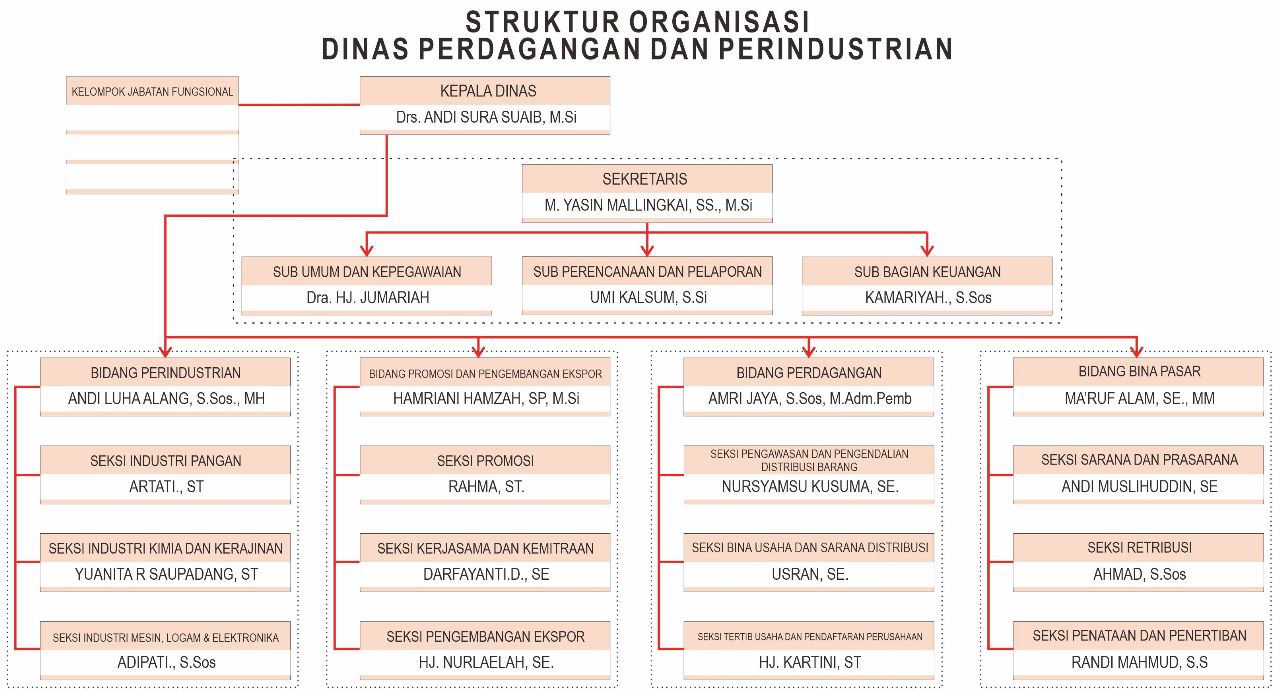
Adapun Sentra IKM yang telah terbentuk dibawah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, antara lain :

Table 1 Sentra IKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Gowa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Sentra IKM | Komoditi | Lokasi |
| 1. | Sentra Pengrajin Gula Merah | Gula Merah | Kelurahan Gantarang, KecamatanTinggi Moncong |
| 2. | Sentra Pengrajin Gula Merah | Gula Merah | Desa Tassese, Kecamatan Manuju |
| 3. | Sentra Batu Merah | Batu Bata | Kecamatan Bontonompo |
| 4. | Sentra Pengrajin Anyaman | Kerajinan Anyaman Daun Lontar | Kecamatan Bontonompo Selatan |
| 5. | Sentra Kue Tradisional | Kue Tradisional | Sero, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu |
| 6. | Sentra Pandai Besi | Parang, Sabit, Pacul, dll | Desa Jonjo, Kecamatan Parigi |
| 7. | Sentra Pengrajin Gula Merah | Gula Merah | Dusun Bollangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang |
| 8. | Sentra Kue Tradisional | Kue Tradisional (Bannang-bannang) | Kecamatan Bontolempangan |
| 9. | Sentra Tepung Ganyong | Tepung Ganyong | Kecamatan Bungaya |
| 10. | Sentra Pengolahan Komoditi Buah Markisa | Sirup dan Dodol Markisa | Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao |
| 11. | Sentra Kopi | Kopi | Malino, Kecamatan Tinggimoncong |
| 12. | Sentra Kue Tradisional | Kue Tradisional (Bannang-bannang) | Kecamatan Tompo Bulu |
| 13. | Sentra Bubuk Kunyit | Bubuk Kunyit | Kecamatan Biring Bulu |
| 14. | Sentra Pengolahan Komoditi Buah Markisa | Sirup dan Dodol Markisa | Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu |

Sumber : Dasar hukum penerapan program One Village, One Product di Kabupaten Gowa

Program One Village, One Product yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa belum dapat dilaksankan dengan optimal karena terkendala dengan kenyataan dilapangan bahwa untuk menjalankan suatu program yang berpedoman hanya pada kebijakan ditingkat pusat tanpa adanya pedoman tersendiri (Perda) yang berimplikasi pada ketidaktahuan akan kebutuhan yang diperlukan pada pelaksana dilapangan yang secara substansial kebijakan tersebut bersifat umum dan tidak mendetail berdasarkan ciri khas dan keadaan lingkungan social, ekonomi, dan politik di Kabupaten Gowa itu sendiri. Karena hal tersebut program one village, one product susah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan atau bahkan bantuan dalam bentuk pendanaan. Tidak adanya peraturan khusus (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan menciptakan ketidakjelasan prosedur dalam melaksanakan program tersebut. Dalam pelaksanaan program OVOP, penting untuk memastikan adanya SOP yang jelas dan terstandarisasi untuk setiap tahapan program. Hal ini akan membantu memastikan bahwa program OVOP dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku industri lokal dan masyarakat.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

(Sumber : Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa)

# **KESIMPULAN**

# Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam program One Village, One product dalam penelitian ini menggunakan empat indicator. Keempat indicator tersebut sebagai berikut :

# Komunikasi. Komunikasi menjadi aspek penting dalam membangun pemahaman dan koordinasi yang baik terhadap program One Village One Product.fakta dilapangan yang didapatkan terkait aspek komunikasi adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakuakan oleh dinas terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa mengenai program tersebut yang mengakibatkan ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program. Dengan koordinasi yang baik, akan meningkatkan produktivitas industry. karena koordinasi yang baik berarti pembagian kerja yang jelas sehingga program tersebut bisa mencapai tujuan dan produktivitas industry juga meningkat. Program OVOP yang dilaksankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki peraturan yang pasti (Perda) untuk menjalankan program tersebut. Dimana program tersebut hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 78 tahun 2007 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industry kecil dan menengah melalui pendekatan satu desa satu produk. Berpedoman pada peraturan pusat yang hanya melihat kondisi umum, tidak secara mendetail yang dimana setiap daerah menghadapi kondisi dan situasi yang berbeda-beda disitulah pentingnya dibuatkan peraturan daerah yang mampu menampung atau mengkoordinir kondisi khusus daerah.

# Sumber daya. Sumber daya merupakan factor penunjang keberhasilan pelaksanaan program One Village, One product di Kabupaten Gowa yang dibawahi langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan jumlah pegawai 21 orang yang khusus menangani program OVOP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program OVOP tidak bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas koperasi dan umkm dan dinas tenaga kerja yang mana berdasarkan tugas pokok dan fungsi seharusnya mampu menjadi partner kerja dari dinas perdagangan dan perindustrian. Dengan jumlah pegawai yang minim tersebut mengakibatkan tidak efektifnya program tersebut.

# Disposisi. Disposisi yang merupakan watak dan karakteristik para implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan/ program. Dalam pelaksanaan program One Village, One Product pemerintah Kabupaten Gowa secara pengetahuan mengenai program OVOP masih sangat minim sebab dalam penerapan program tersebut masih banyak kekurangan seperti pemerintah yang kurang memahami kebutuhan dan potensi masyarakat Kabupaten Gowa sehingga sulit menentukan kriteria yang masuk dalam program One Village, One Product. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemerintah Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program OVOP inilah yang menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

# Struktur Birokrasi. Peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program One Village, One Product di Kabupaten Gowa yakni mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian, Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007, tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra yang bersinergi dengan Visi dan Misi Bupati Gowa. Dalam pelaksanaan program One Village, One Product tidak terjalin Kerjasama antar dinas, dimana program tersebut hanya dilaksanakan oleh hanya satu dinas yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa sebagai penanggungjawab tunggal, namun program tersebut tidak berjalan maksimal karena tidak adanya peraturan daerah yang dibuat untuk mengatur program tersebut sesuai dengan situasi, dan kondisi, serta kebutuhan dilapangan.

# **REFERENSI**

Akarberita.com(*one village one product*, program pemberdayaan desa di Gowa) pada 18 agustus 2020

Ammang, Wawancara, Pelaku Industri Bata Merah, Bontonompo, Kabupaten Gowa, 11 September 2022

Andi Luha Alang, Wawancara, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gowa, 13 Juli 2022

Fatmawati, Wawancara, Pelaku Industri Sirup Markisa, Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, 24 Juli 2022

F Ali, S Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama.

Fred R. Schumann, PhD, (2016) University of Guam School of Business and Public Administration. A Study of One village one product (OVOP) and Workforce Development: Lessons for Engaging Rural Communities around the World.

Haris, Syamsuddin, (Ed), (2005). Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah). Jakarta : LIPI Press

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kansil, C.S.T,( 1991). Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Jakarta

Panduan operasional 2010. Blue print one village one product. Deputi bidang pengkajian sumber daya UKMK.

Peraturan menteri perindustrian RI No. 78 tahun 2008 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industry UMKM melalui pendekatan OVOP .

Poerwadarminta. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Ryaas Rasyid. (2000) Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya.

Sartika, Wawancara, Pelaku Industri Kerajinan Sutra/ Kain Tenun , Taeng, Kabupaten Gowa, 11 September 2022

Syafiie, Inu Kencana.(2003) Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara,

Syaukani Dkk. (2009) Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Gita Media Press, 2015)

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Yamazaki, Jun (November 2010). "A Comparative Analysis of One village one product (OVOP) and its Replicability in International Development". Institute of Social Studies: Netherlands.